

BAB II

TIJAUAN PUSTAKAN

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori Legitimasi

Teori Legitimasi pertama kali di kemukakan oleh Suchman (1995), yang mendefinisikan legitimasi sebagai upaya perusahaan untuk memperoleh dan mempertahankan penerimaan dari berbagai pihak yang terlibat dengan menunjukkan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan norma dan nilai yang di terima oleh masyarakat. Konsep ini berfokus pada bagaimana perusahaan berusaha memastikan bahwa aktivitas dan kebijakan mereka sejalan dengan ekspektasi social yang berlaku, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks ini, teori legitimasi memainkan peran penting dalam membantu perusahaan memahami dan mengelola hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti konsumen, pemerintah, dan masyarakat.

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dapat menjadi sarana strategis untuk memperoleh legitimasi, karena melalui pelaporan sosial, perusahaan menunjukkan tanggung jawabnya terhadap dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari aktivitasnya. (Badjuri et al., 2021), menjelaskan bahwa teori legitimasi sangat penting dalam memahami *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai alat untuk memperoleh legitimasi sosial dan lingkungan. Mereka berargumen bahwa perusahaan yang mengintegrasikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) ke dalam strategi mereka tidak hanya berusaha memenuhi tuntutan regulasi, tetapi juga membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat dan pemangku kepentingan eksternal untuk mendapatkan legitimasi yang lebih kuat.

Lebih lanjut, teori ini mengasumsikan bahwa legitimasi tidak bersifat statis, melainkan dapat berubah seiring waktu mengikuti perubahan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Wijaya (2020), pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang transparan dan sesuai dengan harapan masyarakat dapat memperkuat posisi perusahaan di pasar dan meningkatkan hubungan dengan pemangku kepentingan eksternal. Pengungkapan ini menjadi sarana bagi perusahaan untuk menunjukkan bahwa mereka beroperasi dengan cara yang sah dan dapat diterima oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori legitimasi karena ingin mengetahui pengungkapan informasi lingkungan dan sosial yang dilakukan oleh perusahaan sebagai salah satu langkah penerimaan perusahaan didalam masyarakat dimana perusahaan diakui oleh masyarakat dan aktivitasnya didukung oleh masyarakat.

Dasar dari pemikiran teori legitimasi adalah keberlanjutan akan keberadaan perusahaan berdasarkan apabila masyarakat menyadari perusahaan beroperasi dalam nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri. Hal tersebut memungkinkan ada kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat serta perlu mempertimbangkan norma yang berlaku agar sejalan dengan nilai sosial yang ada (Rahmayani & Anggraini, 2021). Legitimasi perusahaan dapat dilihat melalui bagaimana keselarasan antara nilai sosial dengan norma perilaku dalam sistem sosial di masyarakat. Teori ini juga memiliki makna bahwa tindakan dari perusahaan harus mempunyai aktivitas dan kinerja yang dapat diterima masyarakat. Kehadiran *Sustainability Report* (SR) yang berisi pengungkapan terkait tanggung jawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungan khususnya terkait *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) menjadi bentuk media agar perusahaan mendapat legitimasi dari masyarakat. Ketika

perusahaan mendapat legitimasi dari masyarakat, diharapkan dapat memaksimalkan kinerja keuangannya dalam jangka panjang.

Legitimasi penting bagi organisasi, batasan yang ditetapkan oleh norma dan nilai sosial, dan tanggapan terhadap batasan tersebut mendorong analisis perilaku organisasi dalam hubungannya dengan lingkungan. Organisasi berusaha menciptakan keselarasan antara nilai sosial yang terkait dengan aktivitasnya dan norma perilaku yang ada dalam sistem sosial masyarakat dimana organisasi tersebut merupakan bagian dari sistem tersebut. Selama kedua sistem ini selaras, itu dapat dianggap sebagai legitimasi perusahaan (Ghozali, 2020).

Jika perusahaan merasa legitimasinya dipertanyakan maka mereka dapat mengambil beberapa strategi perlawanan, yaitu diantaranya (Guthrie & Parker, 2022): 1. 2. 3. 4. Melatih dan menginformasikan kepada pemangku kepentingan tentang perubahan yang terjadi di perusahaan, Mengubah pendapat pemangku kepentingan tanpa mengubah perilaku perusahaan, Manipulasi pendapat pemangku kepentingan dengan mengalihkan perhatian pemangku kepentingan dari keprihatinan ke isu lain yang relevan dan menarik; dan Mengubah ekspektasi eksternal dan memengaruhi hasil perusahaan.

Teori legitimasi ini memberikan landasan bahwa perusahaan harus mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilaksanakan perusahaan sehingga bisa berjalan dengan baik tanpa adanya konflik di masyarakat maupun di lingkungan tempat beroperasi (Zahra, 2020).

2.1.2 Teori Stakeholder

Teori stakeholder pertama kali diperkenalkan oleh Stanford Research Institute pada tahun 1963, menjelaskan bahwa organisasi membutuhkan dukungan dari berbagai pihak terkait (stakeholders) untuk memastikan kelangsungan operasional dan pencapaian tujuan organisasi tersebut. Pada tahun 1984, Freeman mengembangkan teori ini lebih lanjut

dengan menekankan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham atau pemiliknya, tetapi juga kepada seluruh pihak yang berkepentingan terhadap aktivitas dan hasil yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Stakeholders dalam konteks ini mencakup investor, karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, masyarakat luas, dan bahkan lingkungan.

Menurut Freeman, keberhasilan sebuah perusahaan ditentukan oleh kemampuannya untuk menjaga hubungan yang saling menguntungkan dengan para pemangku kepentingan ini. Oleh karena itu, teori stakeholder menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi perusahaan dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil, sehingga semua pihak merasa terlibat dan diuntungkan (Freeman, 1984). Konsep ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada kepentingan finansial jangka pendek untuk pemilik atau investor, tetapi juga perlu memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan terhadap masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait.

Teori Stakeholders adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa dalam kegiatan produksi dan operasionalnya, perusahaan perlu memberikan manfaat dan keuntungan bagi para stakeholdernya, karena perusahaan bukanlah entitas yang mementingkan diri sendiri. Stakeholders merujuk pada individu atau kelompok yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perusahaan. Menurut Pratiwi & Hidayah, 2023 teori stakeholder menyatakan bahwa organisasi akan secara sukarela memilih untuk mengungkapkan informasi mengenai kinerja lingkungan, sosial, dan intelektual mereka guna memenuhi harapan yang aktual atau yang diakui oleh stakeholders. Stakeholders perusahaan memiliki hak untuk mengetahui perkembangan atau informasi terkait perusahaan, baik yang bersifat wajib maupun sukarela untuk diungkapkan oleh perusahaan.

Teori stakeholders dalam korporasi diharapkan dapat memberikan manfaat bagi stakeholders, yang dapat diwujudkan melalui penerapan tanggung jawab sosial perusahaan. Melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan, pelanggan, dan masyarakat, serta menciptakan hubungan positif dengan lingkungan tempat perusahaan beroperasi (Edy, 2020). Teori stakeholders sangat penting dalam praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Sustainable Development Goals* (SDGs), karena meskipun teori ini berfokus pada hubungan antara perusahaan dan pemangku kepentingannya, stakeholders memainkan peranan yang sangat penting dalam keberlangsungan kegiatan perusahaan (Yayu, et al., 2023). Teori stakeholder menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan sangat bergantung pada seberapa baik perusahaan dapat mengelola hubungan dengan para pemangku kepentingannya.

Perusahaan yang mampu memenuhi ekspektasi stakeholders baik yang internal seperti karyawan dan manajemen, maupun yang eksternal seperti pelanggan, investor, dan masyarakat cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik. Hal ini karena hubungan yang kuat dengan stakeholders dapat meningkatkan reputasi perusahaan, menarik lebih banyak pelanggan dan investor, serta menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil. Penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi & Hidayah, 2023) menemukan bahwa perusahaan yang menerapkan pendekatan stakeholder dalam pengelolaan bisnisnya dapat meminimalkan risiko dan meningkatkan efisiensi, yang berdampak langsung pada kinerja keuangan perusahaan.

Perusahaan harus berusaha untuk menjaga hubungan dengan para pemangku kepentingan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka, terutama yang mengontrol ketersediaan sumber daya yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, seperti

karyawan, pelanggan dan pemilik. Ada beberapa alasan yang mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan kepentingan stakeholders, misalnya (Sari et al., 2021).

1. Masalah lingkungan yang dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat,
2. Era globalisasi yang mengedepankan perdagangan produk ramah lingkungan,
3. Investor biasanya memilih perusahaan yang mengembangkan kebijakan dan program lingkungan,
4. Organisasi publik dan non-pemerintah (LSM) dan pecinta lingkungan mengkritik perusahaan karena tidak cukup peduli terhadap lingkungan.

Dalam konteks penelitian ini, Stakeholder Theory menjelaskan bahwa pengungkapan SDGs dan Sustainability Report bukan sekadar kewajiban, melainkan alat komunikasi manajemen untuk memenuhi hak informasi para pemangku kepentingan guna mendapatkan dukungan bagi keberlangsungan finansial perusahaan.

2.1.3 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah ukuran yang di gunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam mengelola sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah di tetapkan. Melalui evaluasi kinerja keuangan, perusahaan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan, mengukur keberhasilan strategi bisnis yang diterapkan, serta menentukan langkah –langkah perbaikan yang di perlukan untuk meningkatkan, profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan pertumbuhan jangka panjang (Regina Siri, et al., 2025). Menurut Sulaiman et al. (2021), kinerja didefinisikan sebagai pencapaian pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan inisiatif, program, atau kegiatan yang mendukung visi organisasi. Kinerja keuangan harus diukur secara subjektif untuk mengetahui seberapa efektif penggunaan aset oleh perusahaan untuk meningkatkan keuntungan.

Sehingga kinerja keuangan dapat di definisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dan mengelola sumber daya keuangannya secara efisien. Kinerja keuangan dapat diukur melalui laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Kinerja keuangan merupakan indikator penting untuk menilai sejauh mana efektivitas perusahaan dalam mengelola sumber daya keuangan dan operasionalnya. Menurut (Yamin, 2025) kinerja keuangan merupakan suatu gambaran tentang kondisi suatu perusahaan yang di analisis melalui alat-alat analisis keuangan sehingga dapat digunakan untuk mengetahui baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang kemudian dapat menggambarkan prestasi kerja suatu perusahaan dalam periode tertentu. Kinerja keuangan dapat tercermin dengan menganalisis rasio keuangan. Terdapat berbagai jenis rasio keuangan yang masing-masing memiliki kegunaan tertentu. Diantaranya, rasio solvabilitas, profitabilitas, aktivitas likuiditas, tetapi didalam penelitian (Zahra, 2020) hanya rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini. Profitabilitas perusahaan adalah cara untuk menilai berapa banyak kegiatan investasi menghasilkan pengembalian. Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi *earning power*, semakin tinggi *return* yang diharapkan oleh investor, yang meningkatkan nilai perusahaan.

Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada tingkat penjualan, aset, dan ekuitas tertentu. Rasio profitabilitas mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset, efisiensi tersebut berkaitan dengan penjualan dan pendapatan yang dihasilkan. *Return on Asset* (ROA) merupakan salah satu metrik profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba. *Return on Asset* (ROA) adalah rasio yang mengukur tingkat pengembalian yang di peroleh perusahaan dari aset yang di gunakan. *Return on Asset* (ROA) menunjukkan seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan laba dari total aset yang di miliki.

Semakin tinggi rasio *Return on Asset* (ROA), semakin besar peluang perusahaan untuk meningkatkan pertumbuhan dan secara efektif menghasilkan laba.

Rumus *Return on Asset* (ROA) adalah sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}}$$

Return on Asset (ROA), menggambarkan sejauh mana tingkat pengembalian dari seluruh asset yang dimiliki perusahaan. *Return on Asset* (ROA) digunakan oleh manajemen perusahaan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan perusahaan dengan *Return on Asset* (ROA) memiliki keuntungan yaitu *Return on Asset* (ROA) merupakan pengukuran yang komprehensif dimana seluruhnya mempengaruhi laporan keuangan yang tercermin dari rasio ini. Laporan keuangan yang dimaksud adalah laporan laba rugi dan neraca. Keunggulan lain yang didapat dari pengukuran kinerja dengan *Return on Asset* (ROA) adalah perhitungan *Return on Asset* (ROA), sangat mudah dihitung dan dipahami. *Return on Asset* (ROA) juga merupakan denominator yang dapat diterapkan pada setiap unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas dan unit usaha. Dalam pengukuran kinerja keuangan perusahaan, setiap unit organisasi yang ada dalam perusahaan dapat menggunakan *Return on Asset* (ROA) untuk mengetahui profitabilitas dari setiap unit usaha.

Dengan mengetahui rasio ini, dapat dinilai apakah perusahaan telah efisien dalam memanfaatkan aktivitya dalam kegiatan operasional perusahaan. Rasio ini juga memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan, karena menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan.

2.1.4 Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam dalam Bahasa Indonesia di sebut dengan tanggung jawab sosial adalah komitmen perusahaan untuk berkontribusi terhadap

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan sekitar, baik terhadap karyawan, komunitas, maupun masyarakat luas. Secara Keseluruhan, *Corporate Social Responsibility* (CSR) di anggap memberikan manfaat baik bagi bisnis maupun untuk pembangunan secara umum.

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu konsep yang mengacu pada tanggung jawab perusahaan dalam segala aspek kegiatan bisnis, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan terhadap stakeholder, seperti konsumen, karyawan, investor, masyarakat, dan lingkungan, yang masing masing memiliki kebutuhan dan harapan yang berbeda. Aspek lingkungan seperti pencemaran, limbah, kinerja produksi perusahaan, keamanan produk, serta kondisi tenaga kerja dan karyawan perusahaan, merupakan faktor penting dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dapat disimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah komitmen suatu entitas bisnis untuk memastikan keberlanjutan perusahaan dengan cara meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positifnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang lebih baik, tidak hanya untuk perusahaan tetapi juga untuk komunitas lokal dan masyarakat umum, serta mendorong partisipasi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Fahik ,2020).

Menurut (Sameer, 2021) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah tugas untuk berkontribusi pada pengembangan berkelanjutan perusahaan atau bisnis dalam ekonomi dengan mempertimbangkan tanggung jawab sosial perusahaan dan menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial dan teknologi. John Elkington memperkenalkan konsep *Triple Bottom Line* atau 3P (*profit, people, dan planet*) pada tahun 1988. Teori ini menyatakan bahwa untuk memastikan kelangsungan hidupnya, sebuah perusahaan tidak hanya harus fokus pada keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat serta menjaga keberlanjutan lingkungan.

Konsep ini menjadi dasar dalam penilaian keberhasilan perusahaan yang mencakup tiga kriteria utama, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Tabel 2. 1 Konsep 3P (*Triple Bottom Line*)

No.	3P (<i>Triple Bottom Line</i>)	Keterangan
1.	Ekonomi (<i>Profit</i>)	Fokus utama perusahaan dalam menjalankan usahanya adalah mencapai laba yang tinggi. Selain itu, tujuan perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan. Melalui kegiatan operasional yang mengarah pada pencapaian laba, perusahaan dapat memanfaatkan keuntungan tersebut untuk menutupi biaya pertumbuhan dan perkembangan usaha di masa depan, membagikan dividen kepada pemegang saham, serta membayar pajak kepada negara.
2.	Lingkungan (<i>Planet</i>)	Bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan meliputi upaya untuk melindungi lingkungan, mencegah bencana, dan meminimalkan dampak bencana demi kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Perusahaan juga 26 berfokus pada pengurangan limbah produksi dengan cara mengelola sumber daya alam secara efisien dan mendaur ulang limbah yang ramah lingkungan.

3.	Sosial atau Masyarakat <i>(People)</i>	Suatu konsep yang berfokus pada perlindungan masyarakat menekankan bahwa perusahaan harus melaksanakan aktivitas yang merespons kebutuhan masyarakat. Masyarakat dianggap sebagai stakeholder yang penting bagi perusahaan, karena dunia usaha memerlukan dukungan dari mereka agar dapat bertahan dan berkembang.
----	---	--

Indikator *Corporate Social Responsibility* (CSR) berdasarkan GRI 2021

Tabel 2. 2 Indikator *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Aspek Ekonomi:	17 Indikator
GRI 201: Kinerja Ekonomi	201-1 Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan
	201-2 Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim
	201-3 Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya
	201-4 Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah
GRI 202: Keberadaan Pasar	202-1 Rasio standar upah karyawan pemula berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional
	202-2 Proporsi manajemen senior yang berasal dari

	masyarakat setempat
GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung	203-1 Investasi infrastruktur dan dukungan layanan
	203-2 Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan
GRI 204: Praktik Pengadaan	204-1 Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal
GRI 205: Antikorupsi	205-1 Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi
	205-2 Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur antikorupsi
	205-3 Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil
GRI 206: Perilaku Antipersaingan	206-1 Langkah-langkah hukum untuk perilaku antipersaingan, praktik antipakat dan monopoli
GRI 207: Pajak	207-1 Pendekatan terhadap pajak
	207-2 Tata kelola, pengontrolan, dan manajemen risiko pajak
	207-3 Keterlibatan pemangku kepentingan dan pengelolaan kepedulian yang berkaitan dengan pajak
	207-4 Laporan per negara
Aspek Lingkungan:	31 Indikator

GRI 301: Material	301-1 Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume
	301-2 Material input dari daur ulang yang digunakan
	301-3 Produk pemerolehan ulang dan material kemasannya
GRI 302: Energi	302-1 Konsumsi energi dalam organisasi
	302-2 Konsumsi energi di luar organisasi
	302-3 Intensitas energi
	302-4 Pengurangan konsumsi energi
	302-5 Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa
GRI 303: Air dan Efluen	303-1 Interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama
	303-2 Manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air
	303-3 Pengambilan air 303-4 Pembuangan air 303-5 Konsumsi air
GRI 304: Keanekaragaman Hayati	304-1 Lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung

	304-2 Dampak signifikan dari aktivitas, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati
	304-3 Habitat yang dilindungi atau direstorasi
	304-4 Spesies Daftar Merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi
GRI 305: Emisi	305-1 Emisi GRK (Cakupan 1) langsung
	305-2 Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung
	305-3 Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya
	305-4 Intensitas emisi GRK 305-5 Pengurangan emisi GRK 305-6 Emisi zat perusak ozon (ODS) 305-7 Nitrogen oksida (NOx), belerang oksida (SOx), dan emisi udara signifikan lainnya
	305-4 Intensitas emisi GRK
	305-5 Pengurangan emisi GRK
	305-6 Emisi zat perusak ozon (ODS)
	305-7 Nitrogen oksida (NOx), belerang oksida (SOx), dan emisi udara signifikan lainnya
GRI 306: Limbah	306-1 Timbulan limbah dan dampak signifikan terkait limbah

	306-2 Manajemen dampak signifikan terkait limbah
	306-3 Timbulan limbah
	306-4 Limbah yang dialihkan dari pembuangan akhir
	306-5 Limbah yang dikirimkan ke pembuangan akhir
GRI 306: Efluen dan Limbah	306-1 Pelepasan air berdasarkan mutu dan tujuan
	306-2 Limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan
	306-3 Tumpahan yang signifikan
	306-4 Pengangkutan limbah berbahaya
	306-5 Badan air yang dipengaruhi oleh pelepasan dan/atau limpahan air
GRI 308: Penilaian Lingkungan Pemasok	308-1 Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan
	308-2 Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil
Aspek Sosial:	36 Indikator
GRI 401: Kepegawaian	401-1 Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan
	401-2 Tunjangan yang diberikan kepada karyawan

	<p>puanawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan pada kurun waktu tertentu atau paruh waktu</p>
	401-3 Cuti melahirkan
GRI 402: Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen	402-1 Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional
GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja	403-1 Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja
	403-2 Pengidentifikasian bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden
	403-3 Layanan kesehatan kerja
	403-4 Partisipasi, konsultasi, dan komunikasi pekerja tentang kesehatan dan keselamatan kerja
	403-5 Pelatihan pekerja mengenai kesehatan dan keselamatan kerja
	403-6 Peningkatan kualitas kesehatan pekerja
	403-7 Pencegahan dan mitigasi dampak-dampak kesehatan dan keselamatan kerja yang secara langsung terkait hubungan bisnis
	403-8 Pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja

	403-9 Kecelakaan kerja
	403-10 Penyakit Akibat Kerja
GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan	404-1 Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan
	404-2 Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan
	404-3 Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier
GRI 405: Keanekaragaman dan Peluang Setara	405-1 Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan
	405-2 Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki
GRI 406: Nondiskriminasi	406-1 Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan
GRI 407: Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif	407-1 Operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko
GRI 408: Pekerja anak	408-1 Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak
GRI 409: Kerja Paksa atau Wajib Kerja	409-1 Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja

GRI 410: Praktik Keamanan	410-1 Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia
GRI 411: Hak Masyarakat Adat	411-1 Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat
GRI 413: Masyarakat Setempat	413-1 Operasi dengan keterlibatan masyarakat setempat, penilaian dampak, dan program pengembangan
	413-2 Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat setempat
GRI 414: Penilaian Sosial Pemasok	414-1 Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial
	414-2 Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil
GRI 415: Kebijakan Publik	415-1 Kontribusi politik
GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan	416-1 Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa
	416-2 Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa
GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan	417-1 Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa
	417-2 Insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan

	pelabelan produk dan jasa
	417-3 Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran
GRI 418: Privasi Pelanggan	418-1 Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan

Pada hakekatnya, tanggung jawab sosial perusahaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) bertujuan agar dunia usaha memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara moral, perusahaan dianggap memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial dan alam sekitarnya. Oleh karena itu, entitas bisnis baik yang berbentuk legal maupun non-legal diharuskan untuk menjalin kerja sama dengan pemerintah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Standar yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk menjalankan *Corporate Social Responsibility* (CSR) antara lain dengan menggunakan pedoman yang dirumuskan dalam GRI (*Global Reporting Initiative*). GRI (*Global Reporting Initiative*) berperan sebagai sebuah organisasi yang mendukung penerapan pelaporan keberlanjutan dengan membuat sebuah organisasi yang mendukung penerapan pelaporan keberlanjutan dengan membuat sebuah standarisasi atau pedoman pelaporan. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada penelitian ini diukur menggunakan rumus *Corporate Social Responsibility Index* (CSRI) berdasarkan *sustainability report* (SR) atau laporan keberlanjutan dengan batasan indikator berdasarkan GRI (*Global Reporting Initiatives*) Standar 2021 yang terdiri dari 117 indikator. Perusahaan yang mengungkapkan setiap 117 indikator item tersebut akan di beri skor 1 dan jika tidak ada pengungkapan terhadap

indikator tersebut maka di beri skor 0, maka *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat di rumuskan sebagai berikut:

$$CSRI = \frac{\text{jumlah item pengungkapan CSR perusahaan}}{\text{jumlah item yang di harapkan}}$$

2.1.5 Sustainable Development Goals (SDGs)

Pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) disajikan dalam *Sustainability Report* berisikan informasi perusahaan telah melakukan kegiatan apa saja sebagai wujud berkontribusi dalam mewujudkan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Setiap perusahaan memiliki pelaporan *Sustainable Development Goals* (SDGs) serta cara penyampaian yang berbeda beda karena mereka memiliki kegiatan yang berbeda beda. Tujuan yang hendak dicapai perusahaan berkaitan dengan 17 tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) juga berbeda. Menurut Sebrina et al. (2022) kualitas dalam pelaporan *Sustainability Report* (SR) memberikan investor informasi yang relevan dan andal untuk memperkirakan nilai perusahaan dalam keputusan investasi ekuitas. Sedangkan Hummel dan Szekely (2022) membuktikan pada penelitiannya bahwa terdapat peningkatan substansial dalam kualitas pelaporan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dari waktu ke waktu tetapi masih kurangnya pengungkapan informasi kuantitatif dan berwawasan ke depan.

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan rancangan untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan dan seluruh umat manusia, untuk menjawab berbagai tantangan global yakni kemiskinan, ketidakadilan, perubahan iklim, degradasi lingkungan dan kedamaian serta keadilan (Wulandari, 2021). Menurut Hartati & Hariyono (2020) definisi *Sustainable Development Goals* (SDGs) sesungguhnya adalah

sesuatu yang diukur dalam keberlanjutan pembangunan sebuah negara. Nilai dan tujuan keberlanjutan ini memiliki manfaat dalam konteks sosial yang beragam namun saling berkaitan satu sama lain. *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan suatu sistem yang telah direncanakan dan juga memiliki komitmen oleh para pemimpin bangsa, dimana termasuk pemimpin Indonesia. *Sustainable Development Goals* (SDGs) ini dilaksanakan secara global dan makro (Pangestu, et. al, 2021).

Selaras dengan Tsalis et al. (2020) melakukan pengujian terhadap kualitas pelaporan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan melihat penyajian secara kuantitatif dan kualitatif menunjukkan bahwa ada perbedaan luas dan kualitas informasi yang diungkapkan oleh perusahaan untuk setiap *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dalam penelitian ini, pelaporan secara kualitatif yang dimaksud adalah ketika perusahaan melaporkan kontribusi hanya penjelasan tanpa menunjukkan data angka. Bentuk penyampaian kualitatif yang dilakukan perusahaan ada yang hanya menyatakan dalam beberapa pernyataan bahwa perusahaan ikut berkontribusi dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Kemudian ada yang menjelaskan secara singkat tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) nomor berapa saja yang dicapai perusahaan tetapi tidak menunjukkan data angka. Sedangkan penyampaian secara kuantitatif adalah perusahaan yang menyampaikan kontribusi perusahaan pada *Sustainable Development Goals* (SDGs) secara jelas tujuan nomor berapa saja dilengkapi dengan data angka capaiannya secara spesifik. Beberapa perusahaan menyajikannya dalam grafik dan tabel berisi seberapa besar atau persentase capaian perusahaan terhadap aktivitas yang berhubungan dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah suatu rencana aksi untuk umat manusia, *planet* dan kemakmuran demi meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi,

dan pelaporan (Amalia & Izharsyah, 2022). *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan kerjasama pembangunan yang luas diantara pemangku kepentingan, tidak hanya di tataran lokal dan nasional, *Sustainable Development Goals* (SDGs) memberikan ruang yang luas bagi kerja sama pembangunan global antar pemangku kepentingan. Dimana termasuk kedalam mekanisme kerja sama pembangunan global ini yaitu dalam hal pendanaan, peningkatan kapasitas, Sumber Daya Manusia, alih teknologi dan akses pasar (Amalia & Izharsyah, 2022).

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan tujuan pembangunan PBB yang terdiri dari 17 tujuan, yang terkait dengan empat pilar yaitu sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola (Kementrian PPN, 2022). Adapun 17 tujuan itu sebagai berikut :



Tabel 2. 3 Pengungkapan 17 Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

No.	<i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	Keterangan
1.	Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan.	Mengakhiri kemiskinan dalam

		segala bentuk dimanapun.
2.	Tujuan 2: Tanpa Kelaparan.	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
3.	Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera.	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
4.	Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas.	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
5.	Tujuan 5: Kesetaraan Gender.	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
6.	Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak.	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
7.	Tujuan 7: Energi Bersih dan Terjangkau.	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8.	Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan

		berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
9.	Tujuan 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur.	Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
10.	Tujuan 10: Berkurangnya	Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara.
11.	Tujuan 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan.	Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
12.	Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab.	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13.	Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim.	Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14.	Tujuan 14: Ekosistem Laut.	Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan.

15.	Tujuan 15: Ekosistem Daratan.	Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
16.	Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh.	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
17.	Tujuan 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Selanjutnya ke-17 tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di atas dikelompokkan sebagai 4 pilar pembangunan berkelanjutan (Bappenas), yaitu:

1. Pilar pembangunan sosial terdiri dari tujuan 1, tujuan 2, tujuan 3, tujuan 4, dan tujuan 5.
2. Pilar pembangunan ekonomi terdiri dari tujuan 7, tujuan 8, tujuan 9, tujuan 10, dan tujuan 17.
3. Pilar pembangunan lingkungan terdiri dari tujuan 6, tujuan 11, tujuan 12, tujuan 13, tujuan 14, dan tujuan 15.
4. Pilar pembangunan hukum dan tata kelola terdiri dari tujuan 16.

Penetapan Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menandakan bahwa Indonesia sangat berkomitmen dan bertekad untuk melaksanakan serta mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam upaya perubahan peradaban global yang lebih adil, damai, sejahtera, dan berkelanjutan sebagai perwujudan pelaksanaan kebijakan bebas dan aktif di kancah dunia. Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance*) bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Pada POJK 51/2017 mewajibkan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik untuk membuat dan mempublikasikan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*). Laporan ini harus memuat kinerja perusahaan terkait aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Laporan harus dipublikasikan melalui situs web masing-masing paling lambat 30 April tahun berikutnya.

POJK 51/2017 mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui penerapan prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang ingin mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan. Keuangan Berkelanjutan membantu memastikan bahwa investasi dan kegiatan ekonomi tidak hanya

memberikan keuntungan finansial, tetapi juga berdampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan.

Variabel ini diukur dengan *Indeks Sustainable Development Goals* (SDGs) dari 17 item yang kemudian disesuaikan kembali dengan masing-masing perusahaan. Perhitungan SDGs dilakukan dengan memberikan skor 1 jika suatu item diungkapkan dan 0 jika tidak diungkapkan. Setelah dilakukan pemberian skor pada seluruh item, skor tersebut kemudian dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor setiap perusahaan.

Rumus *Sustainable Development Goals* (SDGs):

$$SDGs = \frac{\text{Item yang diungkapkan}}{\text{Total item}} \times 100\%$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 4 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Alfiah & Arsjah (2021)	Pengungkapan Terkait <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) dan Profitabilitas serta Analisis Industri	Pengungkapan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) berpengaruh positif terhadap profitabilitas.
2	Arifianti & Widianingsih (2022)	Kualitas Pengungkapan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) dan Kinerja Keuangan: Bukti Empiris atas perusahaan	Kualitas pengungkapan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) meningkatkan ROA perusahaan.

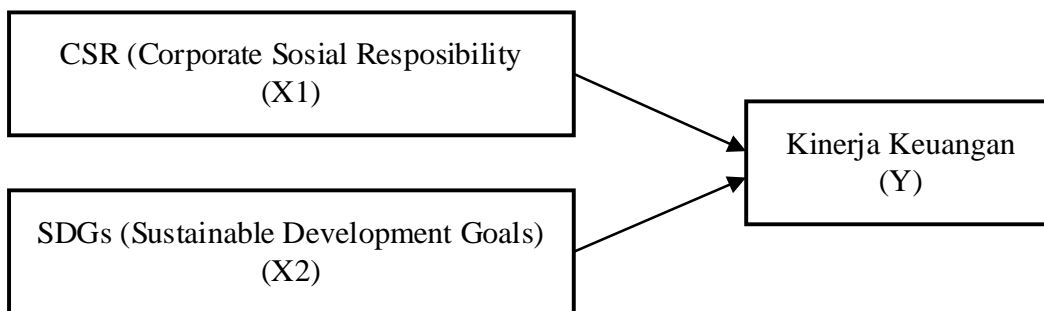
		pertambangan di Indonesia	
3	Arifianti & Widianingsih (2023)	Kualitas Pengungkapan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs); Apakah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Sektor Energi dan Bahan Baku di Indonesia?	Pengungkapan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
4	Zakia & Puspitarsi (2023)	Penerapan <i>Sustainability Reporting</i> terhadap Kinerja Keuangan perusahaan di Indonesia	<i>Sustainability reporting</i> meningkatkan profitabilitas perusahaan.
5	Wartabone (2023)	Pengaruh <i>Sustainability Reporting</i> terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia Periode 2018-2021	Pelaporan keberlanjutan berpengaruh positif terhadap ROA.
6	Shofia & Anisah (2020)	Kinerja Lingkungan dan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Mempengaruhi Profitabilitas perusahaan di Indonesia	<i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.

7	Hidayatul & Oktora (2023)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) terhadap Kinerja Keuangan pada perusahaan manufaktur di Indonesia	<i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) meningkatkan kepercayaan publik dan profitabilitas.
8	Natalia (2024)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Infrastruktur yang terdaftar di BEI 2020-2022	<i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) berpengaruh positif signifikan pada ROA.
9	Farida (2022)	Pengujian kinerja keuangan: <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) sebagai Intervening di BEI	<i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) mempengaruhi kinerja keuangan dan menjadi variabel intervening.
10	Alam et al. (2022)	Vinculum of Sustainable Development Goal Practices and Firms' Financial Performance: A Moderation Role of Green Innovation Parvez	Praktik <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) meningkatkan kinerja keuangan; inovasi hijau memperkuat efeknya.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini mengemukakan Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan manufaktur sub-sektor konsumen barang primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024 dengan menggunakan variabel independen yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) serta variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka konseptual pada penelitian ini adalah:

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual



2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Kinerja Keuangan

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan komitmen perusahaan untuk menjalankan bisnis secara berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan, serta menyeimbangkannya dengan tujuan ekonomi perusahaan (Dewi & Narayana, 2020). Kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan bagian dari keputusan manajemen keuangan dengan memutuskan investasi pada lingkungan perusahaan yang di yakini mampu memberikan manfaat karena *Corporate Social*

Responsibility (CSR) dapat menjadi bahan pertimbangan non keuangan bagi investor dalam melakukan penanaman modal. Perusahaan yang melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) akan mengakibatkan citra perusahaan semakin baik sehingga loyalitas konsumen dan stockholder atas kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang di lakukan (Sindy & Ade, 2022). Menurut (Sholika, 2022) mengungkapkan adanya hubungan positif antara *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap kinerja keuangan perusahaan. Karena jika perusahaan terlihat peduli kepada masyarakat, masyarakat juga akan membayangkan bahwa perusahaan juga memiliki kepedulian mengelola produknya. Beberapa penelitian mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan kinerja keuangan telah di lakukan oleh (Hidayatul & Oktora , 2023) menunjukkan hasil bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya pada penelitian (Regina,et. al, 2025) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan uraian di atas dan di dukung oleh penelitian terdahulu maka hipotesis pertama pada penelitian ini adalah:

H1: *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

2.4.2 Pengaruh Pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Terhadap Kinerja Keuangan

Penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam praktik bisnis mencerminkan komitmen perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menurut KPMG (2023), perusahaan yang mengintegrasikan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam strategi bisnis cenderung memperoleh kepercayaan dari investor, konsumen, dan pemangku kepentingan lainnya karena dianggap memiliki tata kelola dan tanggung jawab sosial yang

baik. Hal ini sejalan dengan teori legitimasi, di mana perusahaan berupaya mendapatkan legitimasi dari masyarakat melalui kegiatan yang selaras dengan nilai-nilai sosial yang berlaku. Implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang baik dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan memperkuat citra positif, yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan kinerja keuangan.

Secara empiris, penelitian oleh Nguyen (2024) menemukan bahwa perusahaan di Vietnam yang aktif mengungkapkan dan menerapkan strategi terkait *Sustainable Development Goals* (SDGs) menunjukkan peningkatan signifikan dalam profitabilitas dan nilai pasar perusahaan. Integrasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) membantu perusahaan dalam mengelola risiko lingkungan dan sosial, sekaligus menciptakan peluang inovasi produk yang lebih berkelanjutan. Dalam konteks perusahaan manufaktur, pengelolaan sumber daya yang efisien dan strategi keberlanjutan yang sesuai dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dapat menekan biaya operasional dan meningkatkan efisiensi, yang berdampak langsung pada kinerja keuangan perusahaan.

Selain itu, penelitian oleh Rovetta et al. (2023) yang menganalisis perusahaan di negara berkembang menunjukkan bahwa implementasi praktik sosial dan lingkungan yang selaras dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) memiliki hubungan positif dengan *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE). Hal ini terjadi karena perusahaan yang berorientasi pada *Sustainable Development Goals* (SDGs) lebih mampu menarik investasi berkelanjutan (*green investment*) dan mempertahankan loyalitas pelanggan jangka panjang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan dan pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) tidak hanya berfungsi sebagai tanggung jawab sosial, tetapi juga sebagai strategi korporasi yang dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas dan di dukung oleh penelitian terdahulu maka hipotesis pertama pada penelitian ini adalah:

H2: *Sustainable Development Goals* (SDGs) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.